

Dahnil Anzar: MBG Konstitusional di Anggaran Pendidikan



POLITIKUS Partai Gerindra [Dahnil Anzar](#) Simanjuntak menilai posisi anggaran proyek makan bergizi gratis ([MBG](#)) memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Dahnil, pos anggaran proyek unggulan pemerintahan [Prabowo](#) Subianto dalam anggaran pendidikan merupakan langkah konstitusional yang strategis dan tak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

"Secara regulasi, Undang-Undang 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Keuangan Negara melegitimasi gizi sebagai penunjang operasional pendidikan," kata Wakil Menteri Haji dan Umrah itu dalam cuitan di akun X resminya, [@Dahnilanzar](#) pada Jumat, 27 Februari 2026.

Anggaran proyek yang mengambil anggaran dari pos pendidikan ini menjadi sorotan lantaran dinilai bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu anggaran pendidikan Indonesia wajib sebesar 20 persen.

Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati mengatakan, anggaran proyek MBG sebesar Rp 223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan dalam APBN 2026.

